

# PEDOMAN PERILAKU ANTI-KORUPSI



Making progress become reality

## DAFTAR ISI

PENDAHULUAN .....	Erreur ! Signet non défini.
DEFINISI .....	2
I. KOMITMEN GRUP UNTUK MEMBERANTAS KORUPSI .....	4
II. TARGET PEDOMAN PERILAKU .....	5
III. PERHATIAN SEMUA ORANG .....	6
1. Komitmen para Eksekutif senior dan Manajer Grup .....	6
2. Komitmen karyawan .....	6
3. Peran departemen etika/kepatuhan .....	7
IV. MEMBERANTAS KORUPSI DALAM KESEHARIAN .....	9
1. Pencegahan .....	9
2. Deteksi .....	10
3. Mendokumentasikan keputusan .....	11
4. Kontrol dan penilaian .....	12
5. Akuntansi .....	12
6. Memperingatkan adanya situasi bahaya .....	13
7. Sanksi .....	13
V. MENGAMBIL TINDAKAN TERHADAP PRAKTIK BERISIKO .....	15
1. Hadiah dan keramah tamahan .....	15
2. Pembayaran fasilitas .....	16
3. Patronasi dan sponsor .....	16
4. Konflik kepentingan .....	17
5. Penggunaan perantara .....	18
6. Pendanaan politik .....	20
7. Representasi kepentingan dan melobi .....	21
LAMPIRAN 1 .....	23
LAMPIRAN 2 .....	25

## PENDAHULUAN

Grup Bouygues pertama kali menyusun program Kepatuhan Antikorupsi pada tahun 2014. Program tersebut direvisi pada tahun 2017 untuk menyertakan persyaratan Undang-undang Sapin 2 Perancis tanggal 9 Desember 2016.

Selain Kode Etik, kami juga ingin memperbarui program ini untuk mempertimbangkan peraturan terbaru dan membuatnya lebih eksplisit dan praktis.

Sejak tahun 2017, pemberantasan korupsi telah mengalami peningkatan di Prancis dan di seluruh dunia dan persyaratan peraturan menjadi lebih ketat, khususnya karena penerapan ekstrateritorial dari beragam undang-undang. Pelanggaran terhadap aturan tersebut memiliki implikasi yang sangat serius untuk Grup, eksekutif senior dan karyawannya, termasuk denda berat, hukuman penjara, dan pembatasan terhadap kemampuan Grup untuk mengikuti penawaran kontrak publik dan swasta dan menggalang dana.

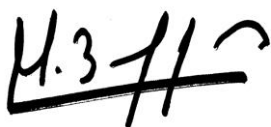
Oleh sebab itu, penting kiranya untuk setiap orang agar memahami, menjalankan, dan mematuhi aturan tentang pencegahan korupsi dengan ketat.

Dengan cukup jelas, Grup kami tidak dapat memberikan toleransi terhadap korupsi dalam bentuk apa pun. Penolakan terhadap segala bentuk praktik korupsi harus menjadi kewajiban mendasar untuk semua eksekutif senior, manajer, dan karyawan.

Kami secara khusus meminta perhatian para eksekutif senior dan manajer untuk mengemban tanggung jawab khusus terkait hal ini. Kami mendesak mereka untuk membaca Pedoman dengan saksama, untuk membagikannya secara luas di antara karyawan dan memastikan bahwa aturan tentang pelarangan, pencegahan, dan kontrol diterapkan secara efektif baik di Prancis dan luar negeri.

Karyawan harus memahami bahwa grup Bouygues tidak menoleransi setiap pelanggaran terhadap aturan yang melarang korupsi. Oleh sebab itu, semua karyawan harus menerima pelatihan antikorupsi. Terutama sekali, mereka harus mengetahui bahwa mereka dapat mengandalkan manajer lini mereka dan Petugas Etika segmen Grup dan Bisnis apabila mereka dihadapkan pada situasi atau kejadian yang meibatkan korupsi. Seorang karyawan dilarang menangani situasi semacam itu sendirian.

Martin Bouygues  
Pimpinan Dewan Direksi



Olivier Roussat  
Group Direktur Utama Grup



## DEFINISI

**Pejabat publik:** siapapun yang berada dalam posisi otoritas resmi, baik ditunjuk maupun dipilih, termasuk:

- siapapun yang dipekerjakan atau digunakan sebagai agen atau perwakilan oleh otoritas nasional, wilayah, atau lokal, entitas yang dikendalikan oleh salah satu dari otoritas tersebut atau otoritas administratif independen;
- siapapun yang dipekerjakan atau digunakan oleh instansi publik;
- kandidat yang akan menjalankan kantor publik;
- kepala partai politik; dan
- karyawan organisasi publik internasional.

**Korupsi:** korupsi bisa aktif maupun pasif.

- **Korupsi aktif** adalah memberi atau menyetujui untuk memberikan keuntungan tidak semestinya kepada entitas publik atau swasta atau seseorang di Prancis atau luar negeri sebagai imbalan karena bertindak atau menahan diri dari bertindak menjalankan tugas resminya agar dapat memberi keuntungan kepada pelaku kejahatan. Pelanggaran tersebut dikomitmenkan meski keuntungan tidak benar-benar dibayarkan atau diberikan. Maksud dari kecurangan tidak harus dibuktikan untuk pelanggaran yang akan dituntut dan dihukum.
- **Korupsi pasif** adalah menerima atau membujuk untuk mendapatkan keuntungan tidak semestinya yang memenuhi ketentuan di atas.

**Eksekutif senior:** artinya direktur dan petugas perusahaan dari setiap Entitas Grup.

**Entitas:** Artinya perusahaan di Prancis dan yang didirikan di luar negeri menurut hukum setempat dan Entitas yang secara langsung atau tidak langsung “dikontrol” oleh segmen Bisnis Grup.

**Grup:** artinya Bouygues SA dan semua perusahaan di Prancis dan yang didirikan di luar negeri menurut hukum setempat dan Entitas yang secara langsung atau tidak langsung “dikontrol” oleh Bouygues SA (termasuk usaha bersama yang dikendalikan oleh Bouygues SA, segmen Bisnis atau Entitasnya). "Kontrol" artinya diberikan kepada perusahaan berdasarkan gabungan antara ketentuan pada Pasal Undang-undang 233-3 dan Undang-undang 233-16 dari Pedoman Dagang Prancis (*Code de Commerce*) dan karenanya menyertakan kontrol secara *de jure* dan *de facto*.

**Manajer:** setiap segmen Bisnis akan menentukan konsep “manajer” yang berlaku pada cakupannya berdasarkan proses dan kegiatannya.

**Segmen bisnis:** artinya, dalam dokumen ini, Bouygues SA dan setiap segmen Bisnis Grup, yaitu, terhitung sejak tanggal perjanjian ini, Bouygues Construction, Bouygues Immobilier and Colas (Bisnis konstruksi), TF1 (Media), dan Bouygues Telecom (Telekomunikasi).

**Petugas Etika dan Petugas Kepatuhan:** setiap segmen Bisnis menunjuk Petugas Etikanya sendiri dan Petugas Etika Grup ditunjuk di dalam Bouygues SA. Secara prinsip, Petugas Etika adalah Penasihat Umum entitas terkait, dan bertanggung jawab untuk menyediakan dan menerapkan Kode Etik Grup, Pedoman Perilaku Antikorupsi, dan program serta kebijakan Kepatuhan. Dia dapat didukung oleh Petugas Kepatuhan yang bertanggung jawab atas penerapan operasional dari hal-hal ini.

**Menjajakan pengaruh:** seperti korupsi, menjajakan pengaruh dapat bersifat aktif maupun pasif.

- **Menjajakan pengaruh aktif** adalah menyuap seseorang untuk menggunakan pengaruh yang sebenarnya atau dugaan pengaruhnya atas orang lain untuk memperoleh keuntungan atau keputusan yang menguntungkan.
- **Menjajakan pengaruh pasif** adalah menyetujui penggunaan pengaruh seseorang atau membujuk untuk mendapatkan keuntungan atau dukungan sebagai imbalan karena telah menggunakan pengaruh seseorang.

## I. KOMITMEN GRUP UNTUK MEMBERANTAS KORUPSI

Grup Bouygues mengutuk semua bentuk Korupsi dan Menjajakan pengaruh aktif dan pasif, baik di sektor publik maupun swasta dan dilakukan di Prancis atau di luar negeri.

Sebagaimana dinyatakan dalam Kode Etik Grup, tindakan Korupsi, Menjajakan pengaruh, dan pelanggaran serupa sepenuhnya bertentangan dengan nilai dan prinsip etika bersama. Oleh sebab itu, Grup mempunyai kebijakan tanpa toleransi karena menganggap korupsi dan setiap pelanggaran terhadap aturan yang berlaku akan tunduk pada tindakan pendisiplinan.

Komitmen untuk memberantas Korupsi ini menjadi lebih dibenarkan sehingga setiap pelanggaran peraturan nasional maupun internasional, bahkan jika sifatnya sangat lokal atau melibatkan jumlah yang tidak signifikan, dapat membawa implikasi yang sangat serius untuk Grup, Eksekutif senior, dan karyawan. Selain hukuman denda dan penjara untuk para eksekutif Senior, pelanggaran terhadap aturan antikorupsi dapat:

- membatasi akses Grup ke kontrak publik dan swasta;
- membatasi kemampuannya untuk melakukan bisnis (misalnya, penyitaan aset, penghentian atau pembatasan pada beragam aktivitas);
- membuat Grup lebih sulit untuk mendapatkan kredit bank atau asuransi dan menarik investor;
- mengakibatkan kekacauan organisasi internal dan berdampak negatif pada staf; dan
- merugikan citra Grup dalam jangka waktu yang lama.

Pada tahun 2017, Grup merevisi program kepatuhan antikorupsinya untuk menyertakan persyaratan undang-undang 9 Desember 2016 tentang transparansi, pemberantasan korupsi dan modernisasi kehidupan bisnis (undang-undang "Sapin 2")<sup>1</sup>. Program kepatuhan yang direvisi saat ini diganti dengan Pedoman Perilaku Antikorupsi ini.

Pedoman ini menetapkan informasi, pencegahan, deteksi, kontrol, dan tindakan sanksi antikorupsi yang akan diterapkan oleh Grup di Prancis dan di luar negeri<sup>2</sup>.

Setiap segmen Bisnis dapat menambahkan atau mengadopsi aturan yang lebih membatasi dibandingkan yang terdapat dalam Pedoman ini berdasarkan peta risikonya atau fitur bisnis khusus. Namun demikian, perubahan apa pun harus disetujui terlebih dulu oleh Petugas Etika Grup.

---

(1) Terutama Pasal 17, II, 1° undang-undang Sapin 2.

(2) Dalam hal usaha bersama yang dikontrol bersama oleh Entitas Grup dan mitra yang tidak memungkinkan untuk mematuhi Pedoman ini, mitra harus diminta untuk membuat komitmen untuk menghormati standar yang setidaknya setara dengan apa yang telah ditetapkan dalam Pedoman ini.

## II. TARGET PEDOMAN PERILAKU

Pedoman Perilaku ini berlaku untuk semua karyawan dan eksekutif senior Grup<sup>1</sup> yang berkenaan dengan kegiatan bisnisnya, tanpa melihat Entitas, proyek, atau negara yang bersangkutan.

Setiap segmen Bisnis harus memastikan bahwa semua Entitas dalam cakupannya mengadopsi dan menerapkan Pedoman Perilaku di Prancis dan luar negeri.

Semua karyawan Grup berkewajiban untuk memberantas korupsi dalam segala bentuk.

Terakhir, Grup berharap agar para pemangku kepentingannya (pelanggan, pemasok, sub-kontraktor, kontraktor pendamping, dan perantara) menerapkan standar yang setidaknya setara dengan apa yang telah ditetapkan dalam Pedoman Perilaku.

---

(1) Dalam hal usaha bersama yang dikontrol bersama oleh Entitas Grup dan mitra yang tidak memungkinkan untuk mematuhi Pedoman ini, mitra harus diminta untuk membuat komitmen untuk menghormati standar yang setidaknya setara dengan apa yang telah ditetapkan dalam Pedoman ini.

### III. PERHATIAN SEMUA ORANG

#### 1. Komitmen para Eksekutif senior dan Manajer Grup

Komitmen para Eksekutif senior dan Manajer Grup adalah penting untuk memastikan bahwa Pedoman Perilaku dibagikan ke dan dijalankan oleh seluruh karyawan.

Peran Eksekutif senior menjadi lebih krusial dalam undang-undang Sapin 2 sehingga menjadikannya bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menerapkan pengaturan antikorupsi, termasuk program kepatuhan. Jika para Eksekutif senior tersebut gagal melaksanakannya, sanksi dapat dikenakan pada mereka secara personal<sup>1</sup>.

Oleh sebab itu, Grup berharap agar semua Eksekutif senior dan Manajer dapat memimpin dengan contoh dengan:

- menahan diri dari semua praktik korupsi dan pelanggaran serupa;
- menerapkan informasi dan tindakan pencegahan yang dijelaskan di bawah; dan
- membantu dalam mendeteksi dan menghukum setiap karyawan yang melanggar Pedoman Perilaku.

Para Eksekutif senior Grup dan Manajer kunci diharuskan untuk membuat komitmen tertulis atas pengaruh ini, yang akan diperbarui setiap dua tahun untuk difaktorkan dalam perubahan dan peraturan, rekomendasi yang dibuat oleh otoritas kontrol dan standar yang lebih ketat.

#### **Pilar penting pengaturan antikorupsi**

Teladan kepemimpinan manajemen adalah hal mendasar Anda adalah duta untuk Pedoman Perilaku ini kaitannya dengan karyawan dan pemangku kepentingan Grup.

Oleh sebab itu, Anda harus menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap Korupsi dalam segmen Bisnis atau Entitas Anda. Anda juga bertanggung jawab untuk menciptakan iklim kepercayaan di mana semua karyawan merasa bahwa mereka dapat mengungkapkan kekhawatiran apa pun yang mungkin mereka miliki tentang persoalan etika.

#### 2. Komitmen karyawan

Semua karyawan Grup berkewajiban untuk memberantas Korupsi dalam segala bentuk. Dengan cara yang benar dan sesuai dengan denda sanksi, termasuk sanksi kriminal, mereka dilarang:

- membiarkan diri mereka untuk dikorupsi dengan cara apa pun atau berusaha untuk mengorupsi pejabat individu swasta atau publik baik langsung maupun melalui perantara; atau

---

(1) Lihat Pasal 17, IV, dan V undang-undang Sapin 2.



- melakukan pelanggaran yang serupa dengan Korupsi (Menjajakan pengaruh, sikap pilih kasih<sup>1</sup>, akuisisi bunga yang melanggar hukum<sup>2</sup>, pencucian uang<sup>3</sup>, dll.).

Oleh sebab itu, Grup berharap agar seluruh karyawan menjalankan Pedoman Perilaku dan menunjukkan kepedulian dan ketegasan sepanjang waktu dalam menjalankan kegiatannya.

Untuk memastikan agar pemberantasan Korupsi dijalankan oleh para pemangku kepentingan kita (pelanggan, pemasok, penyedia layanan, sub-kontraktor, kontraktor pendamping, dan perantara), karyawan harus memastikan agar semua urusan mereka dengan para pemangku kepentingan tersebut sesuai dengan standar kepatuhan Grup.

### Di garis depan

Anda adalah pemain garis depan dalam kepatuhan sehari-hari. Alat yang disediakan oleh Grup harus memungkinkan Anda untuk menjawab semua pertanyaan yang mungkin Anda miliki tentang deteksi dan pemberantasan terhadap Korupsi.

Namun demikian, apabila Anda keraguan atau pertanyaan, Anda harus berusaha mencari nasihat dari Manajer lini Anda, departemen hukum, Petugas Kepatuhan atau segmen Bisnis atau Petugas Etika Grup.

## 3. Peran departemen etika/kepatuhan

Grup menyediakan sarana yang diperlukan untuk memerangi pelanggaran integritas.

Departemen etika/kepatuhan dikepalai oleh Petugas Etika, yang secara prinsip adalah penasihat umum segmen Bisnis, yang didukung oleh tim khusus (dan, sebagai kasus mungkin, Petugas Kepatuhan).

Peran departemen etika/kepatuhan adalah untuk:

- mengorganisasi penyediaan dan penerapan Pedoman Perilaku
- menasihati karyawan tentang segala hal terkait Pedoman; dan

(1) Menurut Pasal 432-14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Prancis, "Setiap orang yang mengemban otoritas publik atau menunaikan misi layanan publik atau mengemban jabatan publik terpilih atau bertindak sebagai perwakilan, administrator, atau agen Negara, otoritas lokal maupun wilayah, usaha publik, perusahaan ekonomi campuran kepentingan nasional yang menunaikan misi layanan publik dan perusahaan ekonomi campuran lokal, atau setiap orang yang bertindak atas nama lembaga yang disebutkan di atas, yang mendapatkan atau berupaya untuk mendapatkan untuk orang lain keuntungan yang tidak semestinya melalui praktik yang melanggar ketentuan hukum atau peraturan yang dimaksudkan untuk memastikan kebebasan akses dan persamaan untuk kandidat yang mengikuti tender kontrak publik dan konsensi layanan publik, akan dihukum hingga dua tahun penjara dan denda sebesar 30.000 EURO."

(2) Menurut Pasal 432-12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Prancis, "Pengambilan, penerimaan, atau penyimpanan, langsung atau tidak langsung, keuntungan dalam bisnis atau operasi bisnis oleh setiap orang yang mengemban otoritas publik atau menunaikan misi layanan publik, atau setiap orang yang mengemban jabatan publik terpilih yang pada saat tersebut yang bersangkutan memiliki tugas untuk memastikan, keseluruhan atau sebagian, pengawasannya, pengelolaan, likuidasi, atau pembayaran, akan dihukum hingga lima tahun penjara dan denda sebesar 500.000 EURO, jika lebih tinggi, dua kali lipat jumlah uang dari pelanggaran."

(3) Menurut Pasal 324-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Prancis, "*Pencucian uang adalah memfasilitasi dengan segala cara pembenaran palsu atas asal aset atau pendapatan pelaku kejahatan atau pelanggaran yang telah mendatangkan keuntungan langsung atau tidak langsung kepada pelaku kejahatan tersebut. Pencucian uang juga bisa berupa membantu dengan menginvestasikan, menyembunyikan, atau mengonversi hasil kejahatan atau pelanggaran secara langsung atau tidak langsung. Pencucian uang dapat dikenakan hukuman hingga lima tahun penjara dan denda sebesar 375.000 EURO.*"

- memberikan penambahan atau ilustrasi pada Pedoman yang dijamin oleh fitur khusus segmen Bisnis yang menindaklanjuti analisis risiko. Semua penambahan harus disetujui oleh Petugas Etika Grup.

Setiap segmen Bisnis memiliki Komite Etika yang melaporkan ke Dewan Direksi. Mereka bertemu secara berkala untuk meninjau semua persoalan etika dan untuk mengevaluasi pengaturan pencegahan dan pendeteksian Korupsi yang sudah ada. Mereka juga berkontribusi untuk menentukan aturan perilaku dan perencanaan tindakan yang akan memandu para eksekutif dan karyawan senior.

## IV. MEMBERANTAS KORUPSI DALAM KESEHARIAN

### 1. Pencegahan

#### Informasi

Untuk memastikan agar semua eksekutif senior dan karyawan memahami dan menjalankan Pedoman Perilaku semaksimal mungkin, Pedoman Perilaku tersedia sepanjang waktu di Intranet Grup dan Intranet setiap segmen Bisnis, atau dengan sarana lainnya yang ditetapkan oleh segmen Bisnis.

Berdasarkan pengaturan mereka, segmen Bisnis secara berkala memeriksa agar konten Pedoman dan komitmen Grup untuk memberantas korupsi dikenali oleh semua orang. Mereka harus menyediakan informasi kepada para senior eksekutif dan karyawannya yang mungkin bermanfaat bagi mereka dalam kegiatannya, seperti:

- memo tentang praktik yang memerlukan perhatian khusus berkenaan dengan pemberantasan korupsi;
- pemberitahuan dan memo hukum atau peraturan tentang peraturan perundang-undangan antikorupsi (rekomendasi oleh otoritas, yurisprudensi, amandemen undang-undang), agar segera diedarkan; dan
- informasi apa pun tentang integritas pemangku kepentingan, dalam hubungannya dengan departemen hukum segmen Bisnis dan, sebagai kasus mungkin, dengan penasihat khusus dan penyedia layanan di luar.

Terakhir, segmen Bisnis harus melakukan upaya terbaik untuk memastikan agar pelanggan, pemasok utama, sub-kontraktor, kontraktor pendamping, konsultan, perantara, dan mitranya mematuhi Pedoman Perilaku atau menerapkan standar yang setara.

#### Pelatihan

Segmen Bisnis merancang dan melaksanakan program pelatihan yang diadaptasi pada kegiatan bisnis dan geografi tempat mereka beroperasi. Program ini harus mencakup:

- Modul **pelatihan wajib** untuk semua karyawan, yang mencakup Pedoman Perilaku dan aturan tentang suap dan korupsi.
- Modul **pelatihan secara personal yang lebih spesifik** untuk eksekutif senior dan karyawan yang paling berhadapan dengan risiko korupsi dan menjajakan pengaruh<sup>1</sup>.

#### Kerangka kerja kontrak

Segmen Bisnis mengidentifikasi kontrak yang harus menyertakan ketentuan antikorupsi.

---

(1) Misalnya, karyawan yang bertanggung jawab untuk ditempatkan di negara dengan Indeks Persepsi Korupsi menurut Transparency International 50 atau kurang (lihat tautan di Lampiran 2 untuk informasi tentang indeks terbaru).

Ketentuan tersebut harus setidaknya disertakan dalam dokumen berikut:

- kontrak yang mempresentasikan risiko Korupsi (mis. perjanjian kemitraan atau usaha bersama, perjanjian sponsor dan patronasi, perjanjian akuisisi perusahaan, kontrak dengan perantara);
- kontrak pekerjaan atau keterlibatan individu untuk karyawan yang berhadapan dengan risiko Korupsi dalam menjalankan pekerjaannya (mis. Karyawan dengan tanggung jawab untuk anak perusahaan, Entitas atau proyek, departemen penjualan atau pembelian); dan
- pendelegasian wewenang yang diberikan pada eksekutif senior yang bertanggung jawab atas Entitas, departemen atau proyek atau yang diberi wewenang untuk membuat komitmen keuangan atau menjalankan fungsi di departemen penjualan atau pembelian.

## 2. Deteksi

Grup telah menerapkan beberapa alat untuk memastikan agar risiko Korupsi khususnya pada kegiatan bisnisnya terdeteksi sedini mungkin. Dalam hal ini, pemeriksaan kepatuhan harus dilaksanakan sebelum memulai setiap proyek besar atau kegiatan bisnis baru atau membuka operasi bisnis baru.



### Pemetaan risiko korupsi

Segmen Bisnis menyusun peta risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberi peringkat risiko terpaparnya Entitas pada ajakan/permintaan Korupsi dari pihak eksternal. Peta risiko tersebut harus mempertimbangkan sektor bisnis dan geografi di mana Entitas beroperasi. Kebutuhan untuk memperbarui peta risiko harus dinilai setiap tahun.

## Penilaian pihak ketiga

Segmen Bisnis menerapkan prosedur untuk menilai posisi pelanggannya, pemasok utama, perantara dan, lebih umum, mitra mereka berdasarkan peta risiko Korupsi. Penilaian ini haruslah efektif, terperinci, didokumentasikan, dan diperbarui berdasarkan tingkat risiko pihak ketiga dan perkembangan dalam hubungan.

## Analisis risiko perusahaan target

Grup memerlukan analisis yang ketat tentang risiko Korupsi yang akan dilaksanakan sebelum penggabungan atau akuisisi apa pun yang melibatkan perusahaan target.

### Penilaian pihak ketiga: faktor yang akan dipertimbangkan

Analisis risiko mitra dapat menyertakan langkah-langkah berikut tergantung pada segmen Bisnis terkait atau peta risiko Entitas:

- pahami latar belakang dan lingkungannya;
- dapatkan informasi tentang struktur pemegang sahamnya, eksekutif kunci, dan pemilik yang diuntungkan<sup>1</sup>;
- berusaha untuk menetapkan apakah pasal tersebut berhubungan dengan pejabat publik;
- identifikasi hukuman atas pelanggaran integritas atau penundaan proses hukum terhadapnya;
- tetapkan elemen utama pengaturan antikorupsinya; dan
- dokumentasikan semua tahap analisis.

Saat dilakukan audit, semua informasi ini akan diperlukan oleh pihak yang berwenang.

## 3. Mendokumentasikan keputusan

Departemen hukum segmen Bisnis harus menerapkan kebijakan penyimpanan yang memadai untuk semua dokumentasi yang timbul dari penerapan Pedoman Perilaku, termasuk peta risiko Korupsi, penilaian pihak ketiga, dan analisis risiko yang dilakukan.

Kebijakan penyimpanan dokumen ini harus memungkinkan segmen Bisnis atau Entitas untuk menunjukkan bahwa transaksi bisnisnya mematuhi peraturan yang berlaku.

Dokumen harus disimpan untuk periode waktu yang mencukupi, yang harus setidaknya lima tahun.

---

(1) Pemilik yang diuntungkan adalah individu atau beberapa individu yang secara langsung atau tidak langsung memiliki lebih dari 25% saham perusahaan, atau melaksanakan kontrol atas lembaga administratif atau manajemen dari skema investasi bersama atau, sebagai kasus mungkin, firma manajemen investasi yang mewakilinya. Lihat Pasal R.561-2 Pedoman Moneter dan Keuangan Prancis.

## 4. Kontrol dan penilaian

Aturan dan prinsip yang ditetapkan dalam Pedoman Perilaku hanya berlaku apabila aturan dan prinsip tersebut dikontrol, dinilai, dan diperbaiki secara berkala.

Semua eksekutif Senior dan Manajer dengan tanggung jawab operasional untuk Entitas Grup harus memastikan bahwa semua transaksi bisnis dijalankan sepatutnya dan semestinya, sehingga terdapat kontrol yang tepat dan agar sumber daya penilaian yang disediakan oleh Grup dan semen Bisnis digunakan.

Segmen Bisnis harus menerapkan beberapa tingkat kontrol dan penilaian penerapan yang benar terhadap Pedoman Perilaku:

- **Tingkat 1:** semua karyawan bertanggung jawab untuk memastikan agar aktivitas bisnis mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Tingkat 2:** kontrol internal dalam segmen Bisnis memastikan agar penilaian mandiri dijalankan dengan benar. Laporan kontrol internal dikirimkan ke Petugas Etika dan Petugas Kepatuhan. Petugas Kepatuhan menggunakan laporan kontrol internal untuk melaporkan pelaksanaan Pedoman Perilaku, perbaikan yang dilakukan atau akan dilakukan, kesulitan yang dihadapi dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan.
- **Tingkat 3:** audit berkala dilaksanakan oleh segmen Bisnis dan departemen audit internal Bouygues SA untuk memastikan bahwa operasi Grup dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Pedoman Perilaku dan kerangka kerja kontrol internal Grup dan Segmen Bisnis. Laporan audit dikirimkan ke Petugas Etika dan Petugas Kepatuhan segmen Bisnis dan Grup, dan ke Komite Etika. Bila perlu, Pedoman Perilaku akan diperkuat dengan mengacu pada temuan audit.

### **Kepatuhan sebagai kriteria dalam penilaian tahunan eksekutif Senior dan Manajer**

Penerapan Pedoman Perilaku dan kepedulian yang dilakukan terkait dengan praktik antikorupsi akan menjadi pertimbangan dalam penilaian tahunan eksekutif Senior dan Manajer Grup.

Oleh sebab itu, kekurangan atau kegagalan selama tahun tersebut dalam pencegahan dan pendeteksian Korupsi dalam anak perusahaannya akan menjadi pertimbangan dan akan berpengaruh pada penilaian tahunan mereka.

## 5. Akuntansi

Grup memastikan bahwa dana dan aset lainnya digunakan untuk tujuan komersial dengan iktikad baik, khususnya dengan mencatat operasi dan transaksi bisnisnya secara akurat dan jujur di setiap akun Entitas, sesuai dengan peraturan dan prosedur internal yang berlaku.

Seluruh eksekutif senior dan karyawan yang melakukan entri akuntansi harus teliti dan mendokumentasikan setiap entri dengan tepat. Selain itu, seluruh transfer dana memerlukan perhatian khusus, khususnya mengenai identitas penerima uang dan alasan transfer.

Terakhir, departemen akuntansi dan keuangan harus terlibat secara dekat dalam hal ini.

## 6. Memperingatkan adanya situasi bahaya

Kode Etik Grup mendorong kebebasan berekspresi. Karyawan dan eksekutif senior dapat melaporkan kekhawatiran atau pertanyaan tentang sebuah praktik yang bertentangan dengan Pedoman Perilaku ke Manajer lini mereka, departemen hukum, atau Petugas Kepatuhan atau Etika.

Grup telah menyiapkan fasilitas pelaporan pelanggaran internal untuk karyawan (termasuk staf eksternal dan insidental), eksekutif senior dan pemangku kepentingan dapat melaporkan kekhawatiran mereka tentang (i) kejahatan atau pelanggaran, (ii) ancaman atau bahaya terhadap kepentingan publik, (iii) pelanggaran atau upaya untuk menyembunyikan pelanggaran perjanjian internasional yang diratifikasi atau disetujui oleh Prancis atau tindakan sepihak yang dilakukan organisasi internasional berdasarkan perjanjian tersebut, hukum, undang-undang dan peraturan Uni Eropa, atau (iv) pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku. Kekhawatiran dan pertanyaan yang diajukan melalui fasilitas pelaporan pelanggaran internal ini harus dilaporkan ke Petugas Etika segmen Bisnis yang terkait. Apabila pelapor mempercayai bahwa situasi tersebut berada di luar cakupan wewenang segmen Bisnis, dia dapat melaporkannya langsung ke Petugas Etika Grup. Demikian juga, Petugas Etika segmen Bisnis dapat menyampaikan kondisi siaga ke Petugas Etika Grup apabila dia percaya bahwa situasi tersebut berada di luar cakupan wewenang segmen Bisnis tersebut.

Prosedur untuk melaporkan, menerima, dan berurusan dengan kondisi siaga dijelaskan di lampiran Kode Etik yang berjudul “Fasilitas pelaporan pelanggaran - prosedur dan aturan mengenai penerimaan dan pemrosesan siaga pelaporan pelanggaran”.

### **Jangan menutup mata**

Semua orang tidak boleh menutup mata terhadap segala bentuk praktik korupsi.

Sejauh otoritas peradilan berkepentingan, Anda dapat dianggap terlibat apabila Anda gagal untuk mencegah perilaku melanggar hukum yang Anda ketahui dan Anda memiliki sarana untuk mencegah.

Apabila Anda menyaksikan tindakan Korupsi, Anda wajib melaporkannya segera. Entitas atau segmen Bisnis yang terkait nantinya akan memutuskan apakah akan melapor atau tidak ke pihak yang berwenang, sehubungan dengan Petugas Etika dan departemen hukum.

## 7. Sanksi

Tindakan Korupsi atau kegagalan untuk mencegahnya dapat berdampak pada hukuman oleh otoritas administratif dan peradilan sebagaimana dijelaskan di Lampiran 1 pada Pedoman Perilaku ini. Eksekutif senior atau karyawan akan tetap secara personal bertanggung jawab atas denda yang dibebankan kepadanya oleh pengadilan.

Berdasarkan kebijakan tanpa toleransinya mengenai Korupsi, Grup akan mengambil tindakan yang dirasa perlu apabila dia menemukan adanya pelanggaran terhadap aturan kepatuhan.

Bagaimanapun, sanksi dan tindakan remediasi akan diambil, yang mencakup:

- pemindahan eksekutif senior dari kantor atau tindakan pendisiplinan terhadap karyawan (yang dapat berujung pada pemberhentian) jika terjadi pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku atau tindakan yang menghadapkan Entitasnya, segmen Bisnis, atau Bouygues SA pada konsekuensi dari tindakan Korupsi;
- tindakan hukum yang disertai dengan tindakan sipil di mana praktik korupsi ditemukan; dan
- penghentian hubungan kontrak dengan sub-kontraktor, kontraktor pendamping, atau mitra yang terlibat dalam tindakan Korupsi.



## V. MENGAMBIL TINDAKAN TERHADAP PRAKTIK BERISIKO

Ditawari perjalanan oleh pemasok, mensponsori tim sepak bola, mendanai kegiatan amal, menjadi pemegang saham di perusahaan klien, membayar komisi kepada agen untuk mempercepat izin kepabeanaan pengiriman barang, atau melakukan kontak dengan legislator (anggota parlemen) yang sedang bertugas menyusun undang-undang “sensitif” untuk Grup adalah situasi yang dapat dihadapi oleh eksekutif senior dan karyawan Grup dan dapat menghadirkan risiko korupsi.

Sangat penting kiranya untuk semua orang agar dapat mengidentifikasi praktik berisiko ini dan mengetahui cara bereaksi atas situasi tersebut sehingga dapat menghindari tanggung jawab apa pun baik untuk mereka sendiri atau Grup.

### 1. Hadiah dan keramahtamahan

Meskipun memberi dan menerima hadiah dan keramahtamahan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia bisnis, hal ini dapat mempengaruhi sikap netral orang yang memberi atau menerima hadiah. Pada awal tahun 2020, Grup menerbitkan kebijakan tentang "Hadiah dan keramahtamahan" yang menetapkan situasi di mana karyawan dapat memberi atau menerima hadiah dan keramahtamahan.

Kebijakan tersebut melarang eksekutif senior dan karyawan dari memberi atau menerima hadiah atau keramahtamahan yang sifatnya tidak mematuhi kebijakan (barang modal, uang tunai, pemutihan utang, dll.), nilai (melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh aturan internal), atau waktu (selama undangan tender atau pengambilan keputusan).

Oleh sebab itu, tergantung jumlahnya, hadiah atau keramahtamahan harus dilaporkan ke atau diotorisasi oleh Manajer lini Anda, bila perlu setelah memperoleh nasihat dari Petugas Kepatuhan atau departemen hukum. Hadiah atau keramahtamahan semacam itu harus dilacak dan, bila memungkinkan, dicatat dengan jelas di akun perusahaan.

#### **Hadiah dan keramahtamahan: praktik yang baik**

Dalam keadaan di mana Anda dapat berharap untuk memberi atau menerima hadiah atau keramahtamahan, Anda harus mengacu pada kebijakan "Hadiah dan Keramahtamahan" Grup dan, bila memungkinkan, pada kebijakan segmen Bisnis terkait.

Ajukan pertanyaan berikut pada diri sendiri:

- Apakah saya nyaman dengan hadiah atau keramahtamahan ini?
- Akankah saya nyaman jika hadiah atau keramahtamahan tersebut akan diketahui?
- Apa konteksnya? Apakah hadiah atau keramahtamahan tersebut merupakan wujud sopan santun bisnis atau sebuah insentif?
- Apakah hadiah atau keramahtamahan tersebut masuk akal berkenaan dengan kebiasaan dalam praktik bisnis?
- Akankah saya tetap independen apabila saya memberi atau menerima hadiah atau keramahtamahan ini?
- Akankah citra Entitas saya, segmen Bisnis, atau Grup terdampak secara negatif oleh hadiah atau keramahtamahan tersebut?

Jika ragu, Anda harus menghubungi departemen hukum Anda atau Petugas Kepatuhan.

## 2. Pembayaran fasilitasi

Pembayaran fasilitasi adalah pembayaran yang tidak semestinya yang dilakukan ke (atau diminta oleh) pejabat publik untuk memfasilitasi transaksi atau mempercepat prosedur administratif rutin (izin kepabeanaan barang, memperoleh visa, izin, dll.) yang dapat diminta secara sah.

Posisi Grup adalah melarang eksekutif senior dan karyawan dari melakukan pembayaran fasilitasi kecuali jika pembayaran diminta secara paksa atau dengan mengancam nyawa karyawan, kesejahteraan fisik, atau keselamatan.

## 3. Patronasi dan sponsor<sup>1</sup>

Tindakan patronasi nilai-nilai Grup, yang selanjutnya bertujuan memberi kontribusi pada kehidupan publik, sebagaimana dinyatakan dalam Kode Etik. Hal ini juga mendorong kontribusi pada acara olahraga, budaya, seni, dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipromosikan.

Namun demikian, tindakan patronasi seperti pemberian sponsor dapat menghadirkan risiko Korupsi sebab tindakan tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan dan/atau secara tidak langsung berkomitmen untuk melakukan tindakan melanggar hukum.

Patronasi berarti mendonasikan uang, barang, atau layanan kepada kepentingan publik.

Pemberian sponsor adalah berkontribusi pada pendanaan sebuah organisasi atau acara seperti seminar, konferensi atau acara olahraga, agar dapat memperoleh potensi keuntungan komersial dari partisipasinya yang terlihat atau yang berhubungan dengan acara tersebut. Oleh sebab itu, pemberian sponsor bertujuan untuk mempromosikan citra dagang suatu produk atau merek melalui pesan iklan di antara hal-hal lainnya.

Tindakan pemberian sponsor harus memiliki tujuan yang sah dan tidak boleh menjadi sarana untuk menyembunyikan dan/atau secara tidak langsung mendatangkan tindakan yang melanggar hukum (pembayaran yang melanggar hukum, korupsi, menjajakan pengaruh, dll.) dan/atau berpartisipasi dalam kegiatan yang dilarang oleh Grup (misalnya, mendanai partai politik).

Oleh sebab itu, partisipasi dalam patronasi atau tindakan pemberian sponsor apa pun dilarang jika:

- dimaksudkan untuk memperoleh atau menahan kontrak, keputusan, atau otorisasi;
- merupakan insentif untuk melaksanakan proyek atau terjadi pada waktu yang strategis yang dapat mempengaruhi kepentingan segmen Bisnis terkait atau Entitas (undangan tender sedang berjalan, pengajuan penundaan otorisasi, dll.);
- penerima sponsor dan/atau eksekutif seniornya memiliki catatan kriminal atau manajemen mereka diketahui sedang dicari oleh organisasi kontrolnya (di Prancis, Pengadilan Audit – *Cour des Comptes*);

---

(1) Bagian ini tidak mencakup sponsor iklan yang diatur oleh Keputusan no. 92-280 tertanggal 27 Maret 1992 tentang kewajiban iklan, pemberian sponsor, dan penyedia layanan belanja jarak jauh.

- penerima sponsor terbukti sedang berusaha mendapatkan keuntungan pribadi atau mengadopsi perilaku atau praktik manajemen yang menyarankan agar anggotanya mungkin atau dapat menggelapkan dana;
- karyawan di belakang tindakan pemberian sponsor memperoleh keuntungan pribadi langsung dari sponsor tersebut; atau
- tindakan pemberian sponsor tersebut tidak berkontribusi apa pun pada segmen Bisnis terkait atau kebijakan pemasaran atau komunikasi Entitas.

tindakan patronasi, segmen Bisnis harus menetapkan kerangka kerja untuk kebijakan patronasinya sehubungan dengan Komite Etik mereka. Jika tindakan patronasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan di kebijakan, Komite Etika segmen Bisnis harus diajak berkonsultasi untuk menyetujui tindakan tersebut, penerima manfaat, dan bentuk kontribusi.

Terakhir, untuk setiap tindakan patronasi atau pemberian sponsor, Grup memerlukan:

- analisis risiko integritas yang akan dilaksanakan pada penerima manfaat;
- kontribusi yang akan ditetapkan dalam kontrak tertulis resmi;
- eksekutif senior atau karyawan di belakang tindakan tersebut untuk menyatakan hubungan (atau kurangnya hubungan) dengan penerima manfaat dari tindakan tersebut; dan
- kontribusi yang akan dipantau untuk memastikan bahwa kontribusi tersebut digunakan untuk tujuan yang ditetapkan dalam kontrak.

#### **Tindakan patronasi atau pemberian sponsor: persoalan sensitif**

Segmen bisnis yang menanggapi undangan tender yang dibuat oleh otoritas kota. Walikota dari kota tersebut mengundang karyawan segmen Bisnis yang bertanggung jawab atas undangan tender untuk mensponsori kompetisi olahraga di kota tersebut selama periode yang sama.

##### **Yang harus dilakukan:**

Anda harus selalu sangat berhati-hati dengan konteks tindakan patronasi atau pemberian sponsor. Jenis tindakan ini sangat dilarang saat segmen Bisnis sedang bernegosiasi dengan otoritas kota.

Jika ragu, Anda harus menghubungi Petugas Kepatuhan segmen Bisnis atau departemen hukum.

## **4. Konflik kepentingan**

Terdapat konflik kepentingan saat kepentingan pribadi eksekutif senior atau karyawan berkonflik atau bersaing dengan kepentingan entitas Grup terkait.

Kode Etik melarang eksekutif senior dan karyawan dari secara langsung terlibat dalam kegiatan yang akan menimbulkan konflik kepentingan dengan Entitas atau segmen Bisnisnya. Jika seorang eksekutif senior atau karyawan mendapati diri mereka berada dalam potensi situasi atau situasi konflik kepentingan yang sebenarnya, mereka harus mengacu pada Manajer lininya tanpa menghilangkan fakta-fakta.

Grup telah mengadopsi program Kepatuhan Konflik Kepentingan.

### **Melaporkan konflik kepentingan**

Ipar perempuan Anda adalah CEO dari sebuah perusahaan yang ingin menjadi pemasok baru untuk segmen Bisnis Anda. Pekerjaan Anda memungkinkan Anda untuk mempengaruhi proses pemilihan pemasok.

#### **Yang harus dilakukan:**

Anda harus melaporkan konflik ini segera ke Manajer lini Anda, yang akan berkonsultasi dengan Petugas Kepatuhan atau departemen hukum tentang tindakan yang tepat yang harus dilakukan (misalnya, jangan ikut serta dalam proses pemilihan tersebut, melakukan tindakan yang tepat agar dokumen terkait tetap rahasia, dll.).

## **5. Penggunaan perantara**

### **Definisi perantara**

Perantara adalah setiap entitas atau orang, apa pun status atau sektor bisnis mereka, yang bertindak sebagai makelar antara pihak ketiga dalam sektor publik atau swasta dan Grup atau salah satu segmen Bisnisnya atau Entitas untuk membantu dalam mendapatkan kontrak, komitmen, keputusan, atau otoritas dalam bentuk apa pun.

Orang yang semata-mata menyediakan layanan konsultasi teknis atau layanan intelektual, tanpa bertindak sebagai makelar, bukanlah perantara sebagaimana ditetapkan dalam paragraf sebelumnya. Tergantung penilaian eskutif Senior atau karyawan terkait apakah orang atau entitas yang ingin mereka tunjuk tersebut perantara atau bukan. Jika ragu tentang layanan yang diajukan, Anda harus berkonsultasi dengan departemen hukum Anda atau Petugas Kepatuhan.

### **Posisi Grup**

Penggunaan perantara sangat dilarang oleh Grup jika tujuannya adalah melakukan kegiatan yang tidak diizinkan oleh Grup, segmen Bisnisnya atau Entitas atau apabila masih terdapat keraguan yang serius tentang integritas perantara bahkan setelah mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

Dalam beberapa situasi, misalnya saat Entitas berharap untuk masuk ke pasar baru atau memerlukan bantuan atau dukungan profesional yang memenuhi syarat untuk melakukan negosiasi atau tindakan komersial lainnya, penggunaan perantara dapat dipertimbangkan.

Namun demikian, praktik ini dapat mendatangkan risiko karena entitas yang berusaha mendapatkan bantuan atau dukungan perantara dapat terkena penalti yang berat jika perantara tersebut terlibat dalam praktik korupsi. Oleh sebab itu, penggunaan perantara harus dipertimbangkan dengan saksama.

Selain itu, perhatian yang lebih besar harus diberikan saat memilih perantara dan dalam semua kesepakatan lebih lanjut dengan perantara tersebut jika;

- perantara bernegosiasi dengan pejabat publik;
- perantara diajukan atau dipaksakan oleh pihak ketiga (pejabat publik, pelanggan, dll.); atau
- hukum setempat mengharuskan penggunaan perantara untuk transaksi yang dipertimbangkan.

Secara prinsip, individu tidak dapat digunakan untuk bertindak sebagai perantara. Namun demikian, mungkin terdapat pengecualian pada prinsip ini apabila otorisasi sebelumnya didapatkan dari departemen hukum terkait atau Petugas Kepatuhan. Pengecualian harus dijustifikasi dan diatur secara resmi dalam prosedur yang akan diajukan untuk persetujuan ke Petugas Etika segmen Bisnis dan Petugas Etika Grup.

Segmen bisnis dapat melarang atau membatasi penggunaan jenis perantara tertentu berdasarkan peta risiko mereka.

### **Persetujuan di awal**

Karyawan yang ingin menggunakan perantara harus terlebih dulu berkonsultasi dengan departemen hukum terkait atau Petugas Kepatuhan dan melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

- Apakah perantara tersebut adalah sebuah badan hukum?
- Apakah perantara memiliki eksistensi hukum dan tempat bisnis yang nyata?
- Apakah perantara mendaftarkan akun?
- Siapa pemilik yang menerima manfaat?
- Apakah perantara tersebut memiliki pengalaman dan reputasi yang mencukupi dalam bidangnya dan sumber daya yang memadai untuk tujuan tersebut (apakah kegiatan bisnisnya nyata, apakah kegiatan bisnisnya menyediakan layanan yang relevan, apakah pelanggannya serius, apakah perantara tersebut memiliki pengetahuan yang asli tentang sektor atau negara terkait, dll.)?

### **Tanda bahaya**

Saat Anda melakukan analisis risiko, Anda harus memberikan perhatian khusus pada hal-hal berikut:

- potensi konflik kepentingan;
- hubungan pribadi dan/atau profesional antara perantara dan pejabat publik;
- kesulitan dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis risiko;
- permintaan yang mencurigakan atau tidak dapat dijelaskan oleh perantara (anonimitas, hubungan eksklusif dengan pelanggan, dll.);
- keyakinan akan adanya pelanggaran integritas oleh perantara, salah satu eksekutif seniornya, atau salah satu pemegang sahamnya;
- termin pembayaran yang diajukan oleh perantara (tunai, pembayaran ke rekening bank yang berada dalam suaka pajak, atau ke rekening selain milik perantara, dll.) atau jumlah biaya yang dikenakan; dan
- penolakan perantara untuk mematuhi peraturan antikorupsi.

Keputusan untuk menggunakan perantara didasarkan pada jumlah dan pentingnya tanda bahaya yang teridentifikasi, sehubungan dengan departemen hukum terkait, Petugas Kepatuhan, atau Petugas Etika.

## Hubungan kontrak

Setiap hubungan bisnis dengan perantara harus diatur oleh kontrak yang disusun dengan bantuan departemen hukum atau Petugas Kepatuhan. Kontrak ditandatangani oleh petugas perusahaan segmen Bisnis terkait atau Entitas.

Kontrak harus menetapkan kerangka kerja kontrak untuk layanan yang akan disediakan oleh perantara dan harus menyertakan klausul antikorupsi.

Pengecualian atas prinsip-prinsip ini dapat diminta oleh segmen Bisnis tergantung kegiatan bisnis mereka. Pengecualian harus dijustifikasi dan diatur secara resmi dalam prosedur yang akan diajukan untuk persetujuan ke Petugas Etika segmen Bisnis dan Petugas Etika Grup.

Daftar kontrak perantara terbaru (dan amandemen) harus disiapkan dan dikirim secara berkala ke Petugas Etika segmen Bisnis terkait.

## Biaya perantara

Biaya perantara harus disepakati secara kontrak dan harus selalu mencerminkan pembayaran yang adil untuk layanan yang dapat dipertimbangkan dan asli. Dengan demikian, biaya harus:

- proporsional dengan lama dan kompleksitas layanan yang diberikan;
- menyertakan komponen tetap dan jika biaya keberhasilan disertakan, jumlah biaya keberhasilan tidak boleh melebihi jumlah komponen tetap. Struktur dan persyaratan setiap biaya keberhasilan harus disetujui terlebih dulu oleh Petugas Etika segmen Bisnis terkait;
- dibayarkan dengan dasar persentase penyelesaian dan bersyarat berdasarkan presentasi faktur perantara yang mendokumentasikan layanan yang diberikan (riset, dokumen kinerja kontrak, laporan, risalah rapat, dll.); dan
- dibayarkan ke rekening bank di negara tempat proyek terkait berada. Apabila perantara tidak berkedudukan di negara tersebut, biaya dapat dibayarkan di negara tempat perantara memiliki kantor pusat bisnis.

Pengecualian atas prinsip-prinsip ini dapat diminta oleh segmen Bisnis tergantung kegiatan bisnis mereka. Pengecualian harus dijustifikasi dan diatur secara resmi dalam prosedur yang akan diajukan untuk persetujuan ke Petugas Etika segmen Bisnis dan Petugas Etika Grup.

## 6. Pendanaan politik

Di Prancis, semua badan hukum sangat dilarang untuk mendanai partai politik atau karir seorang politisi atau kandidat yang menjalankan kantor. Peraturan yang sama berlaku di banyak negara lain.

Kebijakan umum Grup adalah melarang berkontribusi untuk mendanai partai politik atau politisi baik langsung atau tidak langsung melalui LSM, wadah pemikir (think tank), yayasan, dll.

## 7. Representasi kepentingan dan melobi

Grup yang terlibat dalam representasi kepentingan atau melobi<sup>1</sup> agar kegiatannya lebih dikenal dan dipahami. Eksekutif senior Grup dan segmen Bisnis bertanggung jawab untuk menetapkan dan menentukan tujuan dan kebijakan lobi. Kebijakan ini harus mematuhi peraturan yang berlaku dan harus sejalan dengan nilai Grup.

### Eksekutif senior atau karyawan yang terlibat dalam kegiatan lobi

Eksekutif senior atau karyawan yang terlibat dalam kegiatan lobi diharapkan agar berperilaku dengan jujur dan penuh integritas dalam mematuhi peraturan yang berlaku, Kode Etik Grup, dan Pedoman Perilaku.

Di Prancis, segmen Bisnis bertanggung jawab untuk mendaftarkan, memperbarui, dan melaporkan informasi tentang perusahaan, eksekutif Senior, dan karyawan yang berada dalam ruang lingkungannya yang terlibat dalam kegiatan lobi di Prancis ke Otoritas Tinggi Prancis untuk Transparansi dalam Kehidupan Publik (French High Authority for Transparency in Public Life, HATVP).

Eksekutif senior atau karyawan yang terlibat dalam kegiatan lobi harus:

- menahan diri dari korupsi, praktik yang tidak adil atau antipersaingan, dan khususnya dari menawarkan keuntungan yang dilarang dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan pembuat keputusan publik;
- mematuhi tugasnya berupa transparansi dan pelaporan berkenaan dengan HATVP;
- memastikan Entitasnya mematuhi pengaturan pendaftaran untuk register terkait dan aturan khusus yang mengatur kegiatan lobi yang dipertimbangkan;
- menahan diri dari menghasut siapa saja untuk melanggar aturan etis yang berlaku untuk mereka;
- bertanggung jawab untuk tidak berusaha untuk memperoleh informasi atau keputusan melalui cara-cara yang curang;
- menahan diri dari menggunakan informasi yang diperoleh dalam menjalankan kegiatan untuk tujuan komersial atau publisitas;
- menahan diri dari menjual salinan dokumen yang berasal dari otoritas publik pemerintah, administratif, atau independen ke pihak ketiga;
- memastikan agar organisasi dagang dan wadah pemikir (think tank) yang anggotanya mungkin mewakili Grup mematuhi peraturan antikorupsi.

### Sumber daya untuk pihak ketiga untuk tujuan kegiatan lobi

Ketentuan dalam Pedoman Perilaku ini yang terkait dengan analisis risiko, biaya, dan hubungan kontrak yang berlaku untuk perantara juga berlaku untuk perwakilan kepentingan.

Perwakilan kepentingan pihak ketiga harus bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan antikorupsi.

---

(1) Melobi artinya berkontribusi pada debat publik tentang penyusunan atau penerapan undang-undang, peraturan, atau kebijakan publik dengan memberikan opini atau memberikan keahlian teknis.

Merekrut atau meminta bantuan jasa mantan tokoh politik atau terpilih (Menteri, kepala otoritas daerah, dll.) atau pegawai negeri dari lembaga nasional atau internasional harus mematuhi aturan yang mengatur statusnya (mis. jeda waktu setelah mengundurkan diri, dll.). Bagaimanapun, jasanya mungkin tidak digunakan untuk tujuan melobi di area yang dilingkup fungsi mereka sebelumnya hingga jeda waktu resmi setelah mereka mengundurkan diri.

### **Penggunaan firma pelobi: tanda bahaya**

Anda ingin menunjuk pelobi. Anda tidak boleh melakukannya jika pelobi:

- tidak dapat menunjukkan pengalaman dan sumber daya yang diperlukan untuk tujuan tersebut;
- menolak untuk menerima klausul wajib dalam kontrak tertulis;
- menolak untuk didaftarkan pada register yang relevan (misalnya, direktori perwakilan kepentingan HATVP di Prancis, register transparansi Eropa);
- memiliki catatan praktik korupsi atau pelanggaran serupa yang meyakinkan.



## LAMPIRAN 1

# KETENTUAN UNDANG-UNDANG SAPIN 2: ESKALASI PEMBERANTASAN KORUPSI

Undang-undang Sapin 2 Prancis memperkenalkan beberapa tindakan ambisius yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah Korupsi perusahaan. Undang-undang baru tersebut telah menyelaraskan peraturan perundang-undangan antikorupsi Prancis dengan banyak negara lainnya.

### **Menerapkan program kepatuhan**

Undang-undang mengharuskan perusahaan di atas dalam ukuran tertentu untuk menerapkan program kepatuhan berdasarkan delapan pilar kunci:

- mengadopsi pedoman perilaku;
- fasilitas pelaporan pelanggaran internal yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan situasi adanya pelanggaran pedoman perilaku perusahaan;
- pemetaan risiko;
- prosedur untuk menilai situasi pelanggan, pemasok kunci, dan perantara berdasarkan peta risiko;
- prosedur kontrol akuntansi internal atau eksternal;
- pelatihan untuk manajer dan staf yang paling berhadapan dengan risiko Korupsi dan Menjajakan pengaruh;
- pengaturan pendisiplinan untuk memberi sanksi karyawan yang melanggar pedoman perilaku perusahaan;
- pengaturan kontrol dan penilaian internal untuk tindakan yang dilaksanakan.

### **Pendirian Badan Antikorupsi Prancis (French Anti-Corruption Agency, AFA)**

Peran AFA adalah untuk membantu otoritas yang kompeten dalam mencegah dan mendeteksi praktik korupsi dan pelanggaran serupa. Badan ini menjalankan peran pengawasan dan memiliki wewenang sanksi sendiri.

Bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan dengan tindakan dan prosedur untuk mencegah dan mendeteksi korupsi yang harus diterapkan oleh perusahaan besar. Personelnya dapat melakukan audit di lokasi perusahaan. Setelah melakukan audit, AFA dapat memperingatkan perusahaan dan, bila perlu, meneruskan permasalahan tersebut ke dewan sanksinya. Dewan sanksi dapat memerintahkan perusahaan untuk mengadaptasi prosedur internalnya dan memberlakukan denda kepada perusahaan dan eksekutif Senior yang dianggap telah melanggar aturan.

AFA juga akan melaporkan persoalan yang menarik perhatiannya, yang mungkin merupakan tindak kejahatan atau pelanggaran, ke jaksa publik nasional atau jaksa publik internasional untuk kejahatan keuangan.

### **Perjanjian tuntutan yang ditangguhkan**

Jika dibandingkan dengan perjanjian tuntutan yang ditangguhkan (Deferred Prosecution Agreements, DPA) yang ada di Amerika Serikat dan Inggris, undang-undang Sapin 2 memperkenalkan kemungkinan untuk organisasi yang dituduh melakukan Korupsi untuk mencapai kesepakatan dengan jaksa publik nasional.

Prosedur inovatif ini memungkinkan organisasi untuk mencapai penyelesaian dengan jaksa daripada terlibat dalam persidangan yang panjang, yang hasilnya mungkin belum pasti. Perusahaan akan diharuskan untuk membayar denda kepentingan publik ke departemen Keuangan, yang dibatasi 30% dari rata-rata penjualan tahunan dari tiga tahun terakhir. Perusahaan juga mungkin diharuskan untuk mengajukan program kepatuhan selama hingga tiga tahun di bawah pengawasan AFA.

### **Memperluas yurisdiksi peradilan Prancis**

Undang-undang Sapin 2 menegaskan kembali dan memperluas yurisdiksi ekstrateritorialitas peradilan Prancis. Wewenang mereka saat ini diperluas ke pelanggaran yang dilakukan oleh badan hukum atau individu yang biasanya ada di atau dilakukan setidaknya sebagai bagian dari kegiatan bisnis di Prancis, tanpa melihat kebangsaan.

Undang-undang baru ini juga telah mengangkat sejumlah rintangan yang sebelumnya menghambat tindakan peradilan Prancis, yang saat ini memiliki yurisdiksi:

- bahkan ketika perilaku yang diduga tidak dapat dihukum menurut peraturan perundang-undangan negara tempat pelanggaran dilakukan;
- bahkan ketika korban belum melakukan tindakan di negara tersebut; dan
- tanpa mengharuskan jaksa publik untuk melakukan proses hukum yang diinisiasi sebelumnya.

Pengadilan pidana Prancis, seperti mitranya di Inggris dan Amerika Serikat, saat ini memiliki yurisdiksi yang lebih luas dalam hal korupsi.

### **Denda yang lebih berat pada individu**

Sejak diberlakukannya undang-undang Sapin 2, kebijakan pemerintah telah semakin mendorong hukuman yang lebih berat dan sistematis kepada individu yang terlibat dalam praktik korupsi. Ini artinya bahwa tanpa mengesampingkan perjanjian tuntutan yang ditangguhkan yang ditanggung oleh Perusahaan, tindakan hukum tetap dapat diambil terhadap eksekutif Senior dan karyawan yang telah melakukan pelanggaran integritas. Pengadilan menjadikan tujuan ini sebagai prinsip tindakan.

### **Perlindungan kepada pelapor pelanggaran**

Undang-undang Sapin 2 melindungi pelapor pelanggaran dan membebaskan mereka dari tanggung jawab tindak kejahatan apa pun apabila mereka dipaksa untuk mengungkapkan informasi rahasia yang dilindungi undang-undang.

Undang-undang ini juga memberi hak kepada pelapor pelanggaran untuk merujuk secara langsung ke otoritas hukum atau administratif jika terdapat bahaya yang serius atau segera terjadi atau risiko kerusakan yang tidak dapat diubah.

Undang-undang ini juga mengharuskan semua perusahaan yang memiliki setidaknya 50 karyawan untuk menerapkan fasilitas pelaporan pelanggaran yang tepat untuk anggota staf dan pekerja eksternal atau insidental.

## LAMPIRAN 2 TAUTAN DAN REFERENSI BERGUNA

### Prancis: Badan Antikorupsi Prancis (French Anti-Corruption Agency, AFA)

**Rekomendasi AFA**

<https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Recommandations%20AFA.pdf>

**Konflik kepentingan**

<https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr/document/guide-pratique-sur-prevention-des-conflits-dinterets-dans-lentreprise>

**Panduan praktis tentang kepatuhan antikorupsi perusahaan**

<https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr/guide-pratique-fonction-conformite-anticorruption-dans-lentreprise>

**Panduan praktis tentang uji tuntas antikorupsi dalam merger dan akuisisi**

<https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Guide%20pratique%20fusacq%202021-02%20DEF-2-19.pdf>

**Panduan praktis tentang kebijakan hadiah dan keramah tamahan di perusahaan, usaha publik industri dan komersial, LSM, dan yayasan**

<https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Guide%20pratique%20politique%20cadeaux%20et%20invitations.pdf>

### Amerika Serikat

**FCPA Panduan Sumber Daya ke Undang-Undang Praktik Korupsi Asing AS**

<https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2015/01/16/guide.pdf>

**Panduan FCPA (Juni 2020)**

<https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download>

**Inggris**

**Undang-undang Penyuapan 2010: Panduan tentang prosedur yang dapat dilakukan organisasi dagang yang relevan untuk mencegah orang yang berhubungan dengan mereka agar tidak melakukan penyuapan**

<https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf>

**Transparency International**

**Indeks Persepsi Korupsi (CPI, Corruption Perceptions Index)**

<http://www.transparency.org/cpi>



## GRUP BOUYGUES

32 avenue Hoche

F-75378 Paris cedex 08

Tel.: +33 (0)1 44 20 10 00

[bouygues.com](http://bouygues.com)

Twitter: @GroupeBouygues



### MAKLUMAT PENTING

Dokumen ini merupakan ikhtisar dari aturan yang berlaku sejak 30 Januari 2022.

Dokumen ini akan direvisi seperlunya dan perubahan akan diposting hanya di Intranet pada [bouygues.com](http://bouygues.com).

2014 • Revisi: Januari 2022

Kode Etik, Pedoman Perilaku Antikorupsi, dan Program Kepatuhan (Persaingan, Informasi Keuangan dan Perdagangan Sekuritas, Konflik Kepentingan, Embargo dan Larangan Ekspor) grup Bouygues dapat diakses di intranet Grup (ByLink).

**BOUYGUES**